

## Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hkm di Kabupaten Sidenreng Rappang

Basran Nur Basir<sup>1\*</sup>, Muhammad Dassir<sup>2</sup>, Makkarennu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

\*Email: accan123a@gmail.com

**ABSTRACT:** *The social structure is a social construct that consists of the social elements that are related to each other functionally. The social structure is considered capable of keeping the forests and the welfare of the community through various roles performed by a person who occupies a certain position. This study examines the role of the social structure (stratification and differentiation) in relation to the management of community forests in the village of Betao Riase, Sidenreng Rappang District. The purpose of this research is to describe the role of the social structure in each phase of community forest management in the village Betao Riase. This study was conducted in May 2019 - January 2020 held in the village of Betao Riase, District Pitu Riawa, Sidenreng Rappang. The process of data collection is done by conducting interviews with 30 samples were selected by purposive sampling. Data from interviews and then analyzed by using descriptive analysis method. The results showed the determining factors of social stratification in the management of Community Forest in Betao Riase determined by the ability of the economy, educational ability, power, and honor. As for the role undertaken at each stage of the management of community forests in the form of aid for education and health, support of administration, funding and the third contribution it is commonly done by people who occupy a high position and the person who occupies a position that is lower only provide manpower assistance. In the forest management of the society can be a social control for the preservation of forests and also playing a supporting role in terms of economic and material for the public welfare.*

Keywords: Social Structure, Position, Role, Community Forestry,  
DOI: <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v12i1.9210>

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.88 Tahun 2014, Hutan Kemasyarakatan (HKm) hadir untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Perilaku mereka merupakan komponen krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan (Senoaji, 2011).

Masyarakat Indonesia yang tinggal disekitar hutan tersebar di berbagai daerah yang berbeda dengan budaya yang beragam. Unsur-unsur budaya terdiri atas bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencaharian, religi dan kesenian. Berbagai keragaman budayalah yang

menyebabkan struktur sosial di Indonesia sangat beragam. Menurut Tangirerung (2018), struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional. Struktur sosial memiliki dua bentuk yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Menurut Aji (2015), Dari kedua pembeda manusia yang ada, stratifikasi sosial yang paling menonjol.

Terdapat dua unsur utama dalam stratifikasi sosial yakni, status (kedudukan) dan peran. Status menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat sedangkan peran merupakan tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Wahyuni (2014) mengemukakan bahwa Status atau kedudukan dalam kehidupan masyarakat terdapat tiga macam yaitu status yang digariskan (*ascribed status*), status yang di usahakan (*achieved status*) dan status yang diberikan (*assigned status*). Status (kedudukan) dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan, Bahkan dapat dikatakan status (kedudukan) adalah pembentuk dari struktur sosial.

Berdasarkan penelitian Susanti (2011) yang mengkaji tentang struktur sosial di Desa Se'Seng Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. mengemukakan bahwa struktur sosial berperan dalam meningkatkan kelestarian hutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan dan bantuan yang dilakukan oleh mereka yang dianggap memiliki kekuasaan, Kehormatan (*prestise*), hak pendidikan dan kriteria ekonomi dalam setiap tahap pengelolaan hutan. Sejalan dengan penelitian tersebut Tangirerung (2018) mengemukakan bahwa *power*, *prestise*, *previllage*, dan kriteria ekonomi merupakan faktor pembentuk struktur sosial yang utama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan, *previllage* (hak khusus), *prestise* (kehormatan) dan *kriteria ekonomi* (kekayaan) menjadi faktor pembentuk struktur sosial utama dalam masyarakat. Selain itu, struktur sosial dapat berperan sebagai pengontrol dalam pengelolaan hutan agar tidak terjadi perusakan hutan.

Pemanfaatan sumber daya hutan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sekitar hutan. Namun demikian pemanfaatan hutan seringkali berujung pada kerusakan hutan, hal ini dikarenakan masyarakat berusaha mendapatkan manfaat sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek kelestarian dari hutan tersebut. Pengelolaan hutan oleh masyarakat sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian namun tetap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, hal tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sistem pengelolaan hutan seperti *agroforestry*, *silvopastur*, dan berbagai bentuk pengelolaan lainnya.

Pengelolaan hutan di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa *agroforestry*, *silvopasture*, dan pemanfaatan jasa lingkungan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayau (PLTB) di Desa Mattirotasi. Sementara itu, saat ini pengelolaan hutan yang dilaksanakan di Desa Betao Riase yakni pola *agroforestry* dan pemanenan HHBK. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu terjadi deforestasi yang tinggi pada desa tersebut, hal ini dikarenakan penebangan kayu secara ilegal yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan yang ada disana. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini tingkat kerusakan hutan sudah

mengalami penurunan dan hutan sudah dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana peran struktur sosial dalam pengelolaan hutan di Desa Betao Riase sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik, tanpa harus merusak hutan itu sendiri. Penelitian ini juga ingin melihat faktor struktur sosial yang paling berpengaruh dalam pengelolaan hutan di Desa Betao Riase.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 hingga bulan Januari 2020 di Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan data dimulai dari bulan September 2019 hingga bulan Oktober 2019. Desa Betao Riase berada di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hutan yang berada di Desa Betao Riase merupakan hutan lindung yang kemudian di beri skim perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penetapan Desa Betao Riase sebagai tempat penelitian karena masih kurangnya penelitian mengenai peran struktur sosial dalam pengolahan hutan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan khususnya pada Desa Betao. Selain itu, kemudahan akses menjadi salah satu pertimbangan memilih Desa Betao Riase sebagai tempat penelitian

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan diagnostik melalui metode RRA PRA (*Partisipatif Rular Appraisal*). Metode ini melakukan pengkajian terhadap keadaan desa yang melibatkan masyarakat desa secara partisipatif dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Teknik PRA yang digunakan adalah wawancara dengan masyarakat pengelola HKm dengan tujuan untuk mengambil data dan informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan terhadap masyarakat serta narasumber lain yang dianggap memiliki peranan dan kedudukan dalam masyarakat.

### 2.3 Analisis Data

Hasil dari diskusi dan Wawancara akan di analisis dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan melihat bentuk struktur sosial masyarakat baik status (kedudukan) dan perannya dalam pengelolaan HKm di Desa Betao Riase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis deskriptif dilakukan pada setiap kedudukan (status) masyarakat yang ada dalam desa serta peran yang mereka lakukan setelah menempati kedudukan (status) tersebut, kemudian akan tergambaran peran yang dilakukan setiap kedudukan (status) dalam setiap proses pengelolaan hutan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor Pembentuk Stratifikasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat didapatkan empat faktor pembentuk stratifikasi sosial yakni tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kekuasaan dan politik serta tingkat kehormatan. Faktor pembentuk stratifikasi sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Pembentuk Struktur Sosial

No.	Strata Sosial	Profesi	Faktor Pembentuk Struktur Sosial
1	Bangsawan ( <i>Puang, Iye', Uwa, dan Ambo</i> )	Kepala Desa Ketua Kelompok Tani, Sekretaris, dan Bendahara	Ekonomi + Pendidikan + Kehormatan + Kekuasaan dan Politik
2	Masyarakat Biasa	Anggota Kelompok Tani	Ekonomi

Masyarakat yang menempati kedudukan yang tinggi memiliki faktor pembentuk struktur sosial yakni ekonomi, pendidikan, kehormatan serta kekuasaan dan politik. Semetara masyarakat biasa hanya dibentuk oleh satu faktor sosial yakni faktor ekonomi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Nursafitri (2017) dan Maunah (2015) bahwa ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan masyarakat kedalam suatu pelapisan sosial yakni kekayaan, pendidikan, pekerjaan dan kehormatan.

#### 3.2 Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan HKM di Desa Betao Riase

##### 3.2.1 Struktur Organisasi

Pada penyusunan struktur sosial di HKM Betao Riase dilakukan secara musyawara dengan masyarakat setempat. Seseorang yang menempati pengurus inti KTH dianggap mampu oleh masyarakat untuk mengurus KTH dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat didapatkan beberapa pertimbangan mereka memilih pengurus inti KTH meliputi umur seseorang, pendidikan yang baik, dan ekonomi yang cukup. Adapun faktor-faktor yang membentuk struktur organisasi di Desa Betao Riase dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kedudukan sosial masyarakat pada pengelolaan HKM

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Kedudukan Sosial
1.	Ketua Kelompok Lamerrang dan Botto Denge	1. Garis Keturunan Bangsawan ( <i>Iye' dan Ambo</i> ) 2. Kriteria Ekonomi 3. Politik
2.	Ketua Kelompok Salo Cakke	1. Garis Keturunan Bangsawan ( <i>Puang</i> ) 2. Kriteria Pendidikan (Pendidikan Tinggi) S1 3. Kriteria Ekonomi

		4. Politik
3	Ketua Kups	Garis Keturunan
4	Ketua Blok	1. Tingkat Pendidikan 2. Garis Keturunan
5	Sekretaris dan Bendahara	1. Garis Keturunan 2. Tingkat Pendidikan
6	Anggota Kelompok atas	Kriteria Ekonomi
7	Anggota Kelompok Bawah	Kriteria Ekonomi (Rendah)

### 3.2.2 Perencanaan

Pada proses penyusunan ide RK-IUPHHK HKm di HKm Betao Riase melibatkan segala pihak mulai dari pengurus inti HKm dan anggota biasa kelompok tani dengan pendampingan dari dinas kehutanan. Namun, pada proses pembuatan RK-IUPHHK hanya dilakukan oleh pengurus inti kelompok tani, hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai penyusunan RK-IUPHHK hanya diketahui oleh Pengurus inti KTH saja. Selain itu, pemahaman mengenai penggunaan teknologi (Laptop) untuk membuat RK-IUPHHK hanya dikuasai oleh para pengurus inti KTH, Salah satu bagian dari perencanaan adalah penentuan wilayah kelolah setiap anggota kelompok. Pada HKm Betao Riase ketua KTH memiliki hak untuk membagi wilayah Setiap anggotanya namun dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut dapat berupa kepemilikan lahan sebelumnya, Adapun peran struktur sosial pada tahapan perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Status dan Peran Sosial dalam Perencanaan HKm

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua, Sekretaris dan Bendahara (Kekuasaan dan Politik + <i>Prestise</i> )	1. Berperan dalam administrasi kelompok seperti, membuat RKU 2. Menentukan pembagian lokasi lahan HKm setiap anggota
2	Anggota Kelompok	Memberikan usulan mengenai berbagai usaha yang akan dilakukan dan memasang patok batas

### 3.2.3 Persiapan Lahan

Pada pengelolaan HKm di Desa Betao Riase dilakukan secara sederhana seperti mengamburkan tanah, pemagaran areal kelolah dan membersihkan serasa. Perbedaan pengelolaan lahan pada pengurus inti KTH dan anggota biasa terdapat pada pemberian pupuk sebelum penanaman. Pengurus inti KTH memberikan pupuk kompos yang mereka beli, sedangkan anggota biasa karena keterbatasan ekonomi mereka tidak memberikan pupuk. Namun terkadang pengurus inti KTH kadang memberikan sisa pupuk mereka kepada anggota lainnya ataukah meminjamkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membeli pupuk. Adapun peran struktur sosial pada tahapan persiapan lahan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Status dan Peran Sosial dalam Persiapan lahan HKm

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua Kelompok, Sekertaris dan Bendahara (Ekonomi+Kekuasaan dan Politik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berperan dalam memberikan bantuan dana untuk pembelian pupuk</li> <li>Menyiapkan peralatan yang digunakan dalam persiapan lahan.</li> </ol>
2	Ketua Blok (Kekuasaan dan Politik)	Mengkoordinir Semua anggota kelompok dalam blok masing-masing
3	Anggota Kelompok Atas (Ekonomi Atas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan lahan sendiri</li> <li>Menyiapkan peralatan sendiri</li> </ol>
4	Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi Bawah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan lahan milik anggota KTH yang lain dan lahan milik sendiri</li> <li>Menyiapkan peralatan sendiri dan meminjam alat kepada ketua atau anggota lainnya</li> </ol>

### 3.2.4 Jenis Tanaman dan Pola Tanam

Bibit yang didapatkan kedua kelompok tani berasal dari pengajuan proposal yang dilakukan oleh ketua kelompok tani beserta sekretaris dan bendaharanya. Sedangkan, anggota kelompok tani berperan untuk merawat bibit sebelum ditanam, seperti menyiram dan menjaga dari gangguan hewan pengganggu dan hama. Pola tanam yang dilakukan adalah multi kultur, yaitu menanam beberapa tanaman dalam suatu lahan. Jarak tanam yang di gunakan bervariasi mulai dari 4 X 4 meter, 5 X 5 meter, 7 X 7 meter, 8 X 8 meter hingga 10 x 10 meter. Pengetahuan mengenai jarak tanam sebagian besar responden menjawab berasal dari pengetahuan turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Adapun peran struktur sosial pada tahapan jenis tanam dan pola tanam dapat ditinjau pada Tabel 5.

Tabel 5. Status dan Peran Sosial dalam Penentuan Jenis Tanaman dan Pola Tanam

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua, Sekertaris dan Bendahara ( <i>Ekonomi+Kekuasaan dan politik+Prestise</i> )	1. Berperan dalam menyiapkan bibit yang akan di tanam milik melalui pengusulan proposal. 2. Menentukan sendiri pola tanam.
2	Anggota Kelompok (Ekonomi)	1. Merawat bibit tanaman yang akan ditanam 2. Menentukan sendiri pola tanam.

### 3.2.5 Penanaman dan Pemeliharaan

Pada tahapan ini Pengurus inti KTH berperan dalam menentukan waktu tanam yang cocok dan memberikan bantuan peralatan untuk menanam dan memanen hasil hutan. Penanaman tanaman di Desa Betao Riase dilaksanakan pada awal musim hujan hal ini ditentukan oleh masing-masing ketua KTH. Menurut Ketua KTH penanaman di awal musim hujan dilakukan agar tanaman yang ditanam tidak kekurangan air. Selain itu, pertimbangan penanaman bergantung dengan tanggal baik yang dipercaya masyarakat setempat. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan saat ini di HKm Betao Riase adalah berupa pembersihan rumput pengganggu, menghilangkan benalu yang menempel pada pohon durian dan penyiraman serta pemupukan pada bibit tanaman yang baru ditanam. Adapun peran struktur sosial pada tahapan penanaman dan pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Status dan Peran Sosial dalam penanaman dan pemeliharaan

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua, Sekertaris dan Bendahara ( <i>Ekonomi+Kekuasaan dan Politek+Prestise</i> )	1. Berperan dalam menentukan waktu tanam yang cocok 2. Memberikan bantuan peralatan untuk menanam dan memelihara hasil hutan.
2	Anggota Kelompok Atas (Ekonomi atas)	1. Melakukan penanaman bibit dan pemeliharaan sendiri 2. Menggunakan peralatan sendiri
3	Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi bawah)	1. Melakukan penanaman bibit dan pemeliharaan sendiri dan mengerjakan anggota kelompok lainya 2. Menggunakan peralatan sendiri

### 3.2.6 Pemanenan

Pemanenan hasil hutan di HKm Betao Riase sampai saat ini hanya memanen dua jenis tanaman yaitu rotan dan durian. Rotan dan durian yang di panen saat ini adalah tanaman yang sudah ada sebelum HKm

ini di dirikan, artinya durian yang dipanen saat ini adalah durian yang ditanam oleh nenek moyang mereka. Beberapa pengurus inti KTH biasanya tidak memanen langsung hasil hutan mereka, tetapi menggunakan jasa anggota kelompok lainya untuk memenangkan hasil hutan (durian dan rotan) mereka. Pengurus inti KTH pada tahapan ini membentuk suatu kebijakan mengenai jenis hasil hutan yang boleh dipanen sehingga daharapkan dapat menjaga kelestarian hutan. Adapun peran struktur sosial pada tahapan pemanenan hasil hutan dapat ditinjau pada Tabel 7.

Tabel 7. Status dan Peran Sosial dalam Pemanenan

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua, Sekertaris dan Bendahara (Ekonomi+Kekuasaan dan Politik+Prestise+Privilage)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berperan dalam menyiapkan peralatan pemanenan hasil hutan</li> <li>Membantu dalam memasarkan hasil hutan anggota kelompok lainya.</li> <li>Menentukan aturan sistem pemanenan</li> </ol>
2	Anggota Kelompok Atas (Ekonomi Atas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memanen sendiri hasil hutan sendiri</li> <li>Menyiapkan peralatan sendiri</li> </ol>
3	Anggota Kelompok Bawah (Ekonomi Bawah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memanen sendiri hasil hutan sendiri dan Membantu memanen lahan milik anggota lainya</li> <li>Menggunakan peralatan sendiri dan menggunakan alat anggota lainya</li> </ol>

### 3.2.7 Pemasaran dan Bagi Hasil

Produk HKm yang dihasilkan di HKm Betao Riase berupa durian dan rotan. Hasil panen durian maupun rotan sebagian besar langsung dijual ke pengepul. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya transportasi serta jarak yang jauh dari pasar, sehingga masyarakat tidak langsung memasarkan hasil panen mereka ke pasar tradisional maupun ke kota. Namun terdapat beberapa anggota KTH yang langsung memasarkan hasil lahannya sendiri serta beberapa hasil dari anggota kelompok yang dia beli untuk dipasarkan langsung kepasar tradisional. Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki transportasi yang memadai untuk membawa hasil hutannya. Sistem bagi hasil di Betao Riase ditentukan oleh masyarakat pemilik lahan (Strata atas) Namun sebagian besar menggunakan sistem 60:40, artinya 60% hasil hutan untuk pemilik lahan sisanya 40 % untuk buruh tani. Selain itu, terdapat sistem bagi hasil dalam kelompok tani khususnya pada Kelompok Tani Salo Cakke. Ketua KTH Salo cakke memiliki sistem bagi hasil dalam koperasi kelompok taninya yaitu 15 % dari hasil panen wajib diberikan ke koperasi. Adapun peran struktur sosial pada tahapan pemasaran dan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. Status dan Peran Sosial dalam pemasaran dan bagi hasil

No	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Peran Sosial
1	Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Ketua Kups  (Ekonomi+Kekuasaan dan Politik+Prestise+Privilage)	1. Berperan dalam memasarkan hasil hutan milik anggota lainya 2. Menentukan sistem bagi hasil bagi petani pemilik lahan yang dikerjakan lahanya.
2	Anggota Kelompok  (Ekonomi)	Memberikan bantuan fisik atau tenaga kerja yaitu mengangkut hasil hutan kepengepul.

### 3.3 Diferensiasi Sosial

Pada pengelolaan HKm di Betao Riase terdapat satu jenis diferensiasi sosial yaitu diferensiasi umur (*Age Differentiation*). Diferensiasi umur yang terbentuk di HKm Desa Betao Riase terbagi atas dua yaitu usia kerja produktif (25-49 tahun) dan angkatan kerja tua ( $\geq 50$  tahun). Berbagai jenis diferensiasi sosial yang lain seperti diferensiasi etnis, diferensiasi pekerjaan, diferensiasi ras, diferensiasi kelamin dan diferensiasi agama tidak terbentuk. Hal ini dikarenakan kedua diferensiasi yang lain sudah muncul di Desa Betao Riase sebelum HKm terbentuk yakni difrensiasi kelamin dan pekerjaan, setra ketiga diferensiasi yang lain tidak terbentuk karena bersifat homogen yakni diferensiasi agama, ras dan etnis.

## 4. KESIMPULAN

Struktur sosial yang terbentuk di desa betao riasa membentuk peran yang sangat bermanfaat dalam terwujudnya hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tergambarkan dari hasil penelitian bahwa setiap kedudukan yang dibentuk oleh tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, kekuasaan dan politik serta kehormatan, memiliki perannya masing-masing dalam mendukung pembangunan HKm di Desa Betao Riase dalam setiap tahapan pengelolaanya. Peran tersebut dapat berupa memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan, bantuan dana atau sumbangan, bantuan peralatan dan bantuan tenaga kerja. Pada pengelolaan HKm di Desa Betao Riase hanya terbentuk satu diferensiasi yakni diferensiasi umur. Sedangkan untuk diferensiasi lainnya tidak muncul karena sudah terbentuk sebelum adanya HKm dan disebabkan karena masyarakatnya bersifat homogen.

## DAFTAR PUSTAKA

Aji, R.H.S. 2015. Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Sosial. Sosial dan Budaya Syari'1. Vol 2(1) Hal: 32-48  
 Skripsi Strata I. Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

- Maunah,Binti. 2015. Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. Ta'Allum. Vol. 3 No. 1
- Mentri Kehutanan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Nurfitriani. 2017. *Stratifikasi Sosial di Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai*. Fakultas ushuluddin, filsafat dan politik. Makassar
- Senoaji, G. 2011. *Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung bukit daun di Bengkulu*. *Sosiohumaniora*. Vol 13 Hal:1-17.
- Susanti P,K. 2011. *Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Se'Seng Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin.
- Tangirerung, L. 2018. *Peran Struktur Sosial Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Poton Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja*. Fakultas Kehutanan UNHAS. Makassar
- Wahyuni. 2014. *Sosiologi Bugis Makassar*. Makassar : Alauddin University Press.